


R

| | |
|---|---|
|  PERPUSTAKAAN | MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA |
| Diterima : | 10 SEP 2008 |
| Inventarisasi : | 171/FH/Hd.9/16n/2009. |
| Klasifikasi : | Per 345 Suh t |
| Subyek : | Criminal law |



LAPORAN PENELITIAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN INSTRUMEN SKPPP
DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
MANTAN PRESIDEN SOEHARTO**



Oleh:

**CH. MEDI SUHARYONO, SH., M.HUM.
DR. DRS. PAULINUS SOGE, SH., M.HUM.**

**Dilaksanakan dengan bantuan dana stimulan penelitian Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Tahun Anggaran 2008/2009**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
AGUSTUS 2008**

LEMBAR PENGESAHAN HASIL PENELITIAN

No. Proposal:

1. a. Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Instrumen SKPPP dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Mantan Presiden Soeharto
b. Macam Penelitian : Lapangan (Kelompok)
2. Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap dan Gelar : CH. Medi Suharyono, SH., M.Hum
b. Jenis Kelamin : Laki-laki
c. Usia saat pengajuan proposal : 51 tahun
d. Jabatan akademik/Golongan : Lektor / III-c.
e. Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

3. Lokasi Penelitian : Kejati DIY & Kejari Yogyakarta

4. Jangka waktu Penelitian : 6 bulan (enam bulan.)

5. Biaya yang diajukan : Rp 3.740.000,-

Anggota Peneliti

Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum.

Yogyakarta, 16 Agustus 2008.

Ketua Peneliti,

CH. Medi Suharyono, SH., M.Hum

Ketua Bagian Hukum Pidana FH-UAJY

P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS.



Ketua Fakultas Hukum UAJY,

Hestu Cipto Handoyo, SH., M.Hum.

Ketua Lembaga Penelitian UAJY

Ir. B. Kristyanto, M. Eng, Ph.D.

01 SEP 2008

ABSTRACT

The research conducted to study the application of the Decision Letter terminating Prosecution of Soeharto's case from juridical point of view is a normative research. It was carried out by collecting secondary data on the trial process of Soeharto's case and the application of the Decision Letter terminating Prosecution of Soeharto's case from various books and newspaper articles and reports. Besides, two informants, one from The High Prosecution Institute of Yogyakarta Special Province, and the other from The State Prosecution Institute of Yogyakarta were interviewed. The data collected was analyzed by using qualitative method. The research result showed that the application of the Decision Letter terminating Prosecution of Soeharto's case because of permanent illness is unlawfull. According to article 140 of The Criminal Procedure Code, permanent illness is not determined as reason for terminating prosecution. In fact what the Attorney General should do was to delay the Prosecution of Soeharto's case until he recovers from his illness. Therefore the application of the Decision Letter terminating Prosecution of Soeharto's case is human but unfair for the Indonesian society in general.

Key Words: *1. Decision Letter terminating Prosecution of Soeharto's case, 2. Unlawfull, 3. Human but unfair.*

PERHATIAN

1. Taatilah Peraturan Perpustakaan
2. Jagalah Kebersihan dan Rawatlah Pustaka yang Anda Baca dengan baik
3. Dilarang meminjamkan kepada orang lain
4. Kembalikan tepat pada waktunya

KATA PENGANTAR

Penelitian dengan bantuan dana stimulan penelitian Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun Anggaran 2008/2009 dengan judul: Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Instrumen SKPPP dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Mantan Presiden Soeharto, telah dapat diselesaikan.

Banyak pihak telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini, karena itu ucapan terima kasih perlu disampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Ketua Kejaksaan Tinggi DIY.
5. Ketua Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

Harapan kami, semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di Indonesia secara umum dan secara khusus dalam pengembangan ilmu hukum acara pidana, khususnya yang berkaitan dengan penuntutan.

Yogyakarta, 16 Agustus 2008.

Ketua Peneliti,

CH. Medi Suharyono, SH., M.Hum.

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL | |
| LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN | ii |
| ABSTRACT | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Tinjauan Pustaka | 5 |
| C. Perrumusan Masalah | 9 |
| D. Tujuan Penelitian | 9 |
| E. Manfaat Penelitian | 10 |
| F. Metode Penelitian | 11 |
| BAB II. TINJAUAN JURIDIS TERHADAP PENUNTUTAN | 16 |
| A. Prapenuntutan | 16 |
| B. Penuntutan | 18 |
| C. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKPPP) | 22 |
| BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 24 |
| A. Proses Perkara Tindak Pidana Korupsi Mantan Presiden Soeharto.. | 24 |
| B. Reaksi Masyarakat Terhadap Penerapan Instrumen SKPPP dalam Penyelesaian Perkara Korupsi Mantan Presiden Soeharto | 28 |
| C. Penerapan Ketentuan Hukum tentang SKPPP dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Mantan Presiden Soeharto | 36 |
| BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN | 41 |
| A. KESIMPULAN | 41 |
| B. S a r a n | 42 |
| DAFTAR PUSTAKA | 43 |
| LAMPIRAN | 45 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Soeharto menjadi Presiden RI kedua dan mulai memerintah Indonesia setelah peristiwa 30 September 1965 yaitu pemberontakan PKI, berdasarkan Supersemar yang sampai sekarang masih dipertanyakan kebenarannya itu. Ia mempunyai dua sasaran politik utama yaitu, mengkonsolidasikan kekuasaannya dan mendemobilisasi serta mendepolitisasi masyarakat. Ia berusaha mencapai kedua tujuan tersebut dengan cara-cara yang berani dan sistematis.

Soeharto segera mempertunjukkan gaya pemerintahannya dan mengorganisir salah satu pembantaian massal yang paling brutal dan berdarah di Republik ini yaitu gerakan pembersihan G30S PKI setelah terbukti bahwa PKI berada di balik peristiwa 30 September 1965. Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia direkayasa sehingga kendali berada pada eksekutif. Soeharto memaksa 10 (sepuluh) partai yang ada pada tahun 1973 bergabung dalam 3 partai, yaitu Golongan Karya (GOLKAR) yang notabene adalah Partai pemerintahan Soeharto, Partai Persatuan Pembangunan (P3), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Sudah dapat diduga bahwa penggabungan yang demikian itu akan menimbulkan konflik internal baik di dalam partai P3 maupun PDI sehingga kedua partai itu menjadi lemah, suatu hal yang memang dikehendaki Soeharto agar GOLKAR dapat mendominasi percaturan politik di Indonesia. MPR hanya bersidang sekali dalam jangka waktu lima tahun untuk memilih presiden dan menetapkan GBHN. Dalam masa pemerintahan

Soeharto MPR telah bersidang sebanyak 6 (enam) kali, dan setiap kali berhasil memilihnya sebagai presiden karena Soeharto tidak pernah mempunyai saingan. Walaupun ada saingan, ia tidak akan mungkin menjadi presiden karena Soeharto mengangkat 600 dari anggota MPR yang berjumlah 1000 orang. Sisa kursi, 400 buah, diperebutkan melalui PEMILU yang direkayasa, yang juga dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali. Selama PEMILU, tidak ada orang yang boleh menentang ataupun mengkritik presiden. GOLKAR memperoleh 70% suara dan dengan demikian Soeharto memperoleh hampir 900 kursi di MPR. Sementara itu, DPR memiliki 500 anggota, 100 diantaranya diangkat Soeharto. GOLKAR biasanya memperoleh 70% dari 400 kursi. Selain itu, daftar calon anggota DPR dari ketiga partai harus disetujui Soeharto sebelum PEMILU.

Di masa Soeharto kebebasan pers sangat dikekang karena sensor dan pengawasan merupakan hal yang biasa ketika itu. Tahun 1994 pemerintah membredeli 3 mingguan berita utama yaitu Tempo, Detik dan Editor. Dua di antaranya merupakan mingguan yang paling terkenal di negeri ini. Semua media massa, lembaga-lembaga pendidikan, upacara keagamaan, dan pertunjukan seni dipantau dan diatur secara ketat guna membungkam berbagai suara sumbang terhadap pemerintah.

Di bidang ekonomi, keserakahan Soeharto dan keluarganya pada tahun 1980-an telah menjadi suatu kelemahan politik yang serius, seiring dengan semakin kuatnya cengkeraman putra putrinya dan kroni-kroninya pada perekonomian Indonesia. Sumber-sumber inteligen kedutaan AS di Jakarta memperkirakan, Soeharto sendiri memiliki kekayaan \$ 15 milyar pada tahun 1989. Jika digabung dengan kekayaan isteri dan anak-anaknya, jumlah seluruh kekayaannya menjadi \$ 30 milyar, dan jika ditambah dengan lingkaran sipil dan militer, akan membengkak menjadi \$ 60 milyar, kira-kira sama

dengan utang luar negeri Indonesia saat itu. Kekayaan itu didapat dari perusahaan-perusahaan yang dimiliki Soeharto dan kroni-koninya, korupsi yang dilakukan terhadap hasil pendapatan Indonesia, pinjaman-pinjaman dari negara donor, dan pungutan-pungutan terhadap para pengusaha yang beroperasi di Indonesia.

Krisis ekonomi yang dimulai pada pertengahan 1997 yang membuat nilai rupiah turun sampai dengan Rp 15.000,00 untuk setiap dollarnya dan memburuknya kesehatan Soeharto menjelang Desember 1997, menyebabkan kekuatan massa semakin berani melawan Soeharto dan klimaksnya adalah kerusuhan Mei 1998 yang berdampak pada kehancuran dan kerugian material yang luar biasa yang akhirnya memaksa Soeharto meninggalkan kursi kepresidenannya.

Lengsernya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 disebabkan karena desakan demonstrasi mahasiswa yang menduduki gedung MPR/DPR, sehingga memaksa Harmoko, ketua MPR saat itu meminta Soeharto untuk turun. Namun lengsernya Soeharto ini terutama disebabkan karena AS yang sejak tahun 1960-an mendukung Soeharto, menarik dukungannya hanya beberapa saat menjelang mundurnya pengusaha rezim Orde Baru itu. Kondisi ini mengakibatkan mereka yang dekat dengan Soeharto mulai meninggalkannya karena melihat pemerintahan Orde Baru semakin goyah dan Soeharto tidak dapat lagi mempertahankan kekuasaannya sebab usianya semakin tua dan sakit-sakitan.

Melacak dan mengadakan investigasi terhadap harta kekayaan yang dicuri dan disembunyikan mantan Presiden Soeharto bukan suatu pekerjaan mudah. Hal ini diperparah oleh tidak adanya kehendak politik atau kemauan politik pemerintah untuk menuntaskannya. Tampak sekali bahwa masalah ini dibiarkan mengambang dan akhirnya

akan dilupakan seiring dengan berlalunya waktu. Namun satu hal yang tidak akan pernah dilupakan oleh rakyat di negeri ini ialah bahwa nama Soeharto secara eksplisit tercantum dalam Ketetapan MPR untuk diadili (TAP MPR No.XI/MPR/1998) karena merupakan salah satu tuntutan reformasi.

Maka dimulailah pengadilan terhadap Soeharto yang dapat dikatakan asal-asalan itu guna mewujudkan amanat TAP MPR tersebut. Dikatakan demikian karena sejak masa pemerintahan Habibie, kemudian Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri sampai pada masa kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Yusuf Kalla (YK), kasus korupsi mantan Presiden Soeharto seolah-olah dibiarkan terus mengambang, dan akhirnya proses hukum dihentikan lewat surat ketetapan penghentian penuntutan perkara (SKPPP) yang dibuat Kejaksaan Negeri Jaksel 11 Mei 2006 atas perintah Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh.

Bertolak dari latar belakang di atas, maka Tim peneliti ingin mengetahui apakah penerapan Pasal 140 KUHP dengan menggunakan instrumen SKPPP untuk mengendapkan kasus Soeharto itu sudah tepat. Langkah yang ditempuh pemerintah ini telah menimbulkan kontroversi berupa pendapat pro dan kontra yang meluas di dalam kehidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan studi tentang hal-hal yang berkaitan SKPPP ini dengan melakukan penelitian, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Instrumen SKPPP dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Mantan Presiden Soeharto", sebagaimana tercantum dalam judul laporan penelitian di atas.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Ketika terjadi Gerakan 30 September 1965 pimpinan Letkol Untung yang didalangi PKI, Soeharto menjabat sebagai Pangkostrad. Selaku Pangkostrad, Mayor Jenderal Soeharto bergerak cepat dan memberikan penjelasan kepada para stafnya yang berkumpul di ruang utama Kostrad pada pagi hari tanggal 1 Oktober sebagai berikut:

“Pernyataan Untung, saya ulangi sama sekali tidak benar. Bahwa gerakannya hanya menghadapi apa yang disebut sebagai *Dewan Jenderal* yang akan mengadakan kup. Sehingga mereka mendahului bertindak dengan menculik tokoh-tokoh pimpinan Angkatan Darat dengan alasan untuk menyelamatkan Presiden Sukarno. Kenyataannya Presiden Soekarno saat ini tidak ada di Istana. Dan apa yang disebut mereka sebagai *Dewan Jenderal* itu tidak ada. Yang ada yaitu *Wanjakti* (Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi Angkatan Darat). Dan saya salah seorang anggotanya. *Wanjakti* tidak pernah membicarakan masalah politik. Jadi samasekali tidak benar apa yang dikatakan Untung. Dan menurut saya ini bukan sekedar untuk menghadapi apa yang katanya disebut *Dewan Jenderal*. Akan tetapi lebih jauh dari itu, yaitu gerakan mengadakan kup, untuk merebut kekuasaan negara secara paksa dan pasti didalangi oleh PKI. Menghadapi kejadian ini, kita tidak hanya ingin mencari keadilan, karena jenderal-jenderal kita telah diculik dan dibunuh, akan tetapi kita juga terpanggil sebagai Sapta Marga. Karena saat ini yang terancam adalah negara dan Pancasila. Saya memutuskan untuk melawan mereka. Kalau kita tidak melawan mereka, kita akan mati. Seorang prajurit Sapta Marga harus memilih mati membela negara dan Pancasila dari pada mati konyol. Cukup banyak pengalaman saya dalam perjalanan Republik ini. Dan saya tahu bagaimana seharusnya saya bersikap. Insya Allah kita akan diberi jalan untuk menumpas pemberontakan mereka!” (Arswendo1986: 176-178).

Dari kutipan di atas jelas terlihat bahwa, dalam situasi yang sulit Soeharto dapat menganalisis maksud dan tujuan G30S PKI dengan tepat sehingga mampu mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk menumpas gerakan tersebut. Putusan untuk melawan dan menumpas gerakan tersebut tidak hanya sekedar mencari keadilan bagi para jenderal yang menjadi korban G30S PKI tetapi lebih dari itu yakni membela negara dan mempertahankan eksistensi Pancasila.

Begitu pentingnya tugas membela negara dan mempertahankan Pancasila, maka ketika menjadi Presiden RI dalam berbagai kesempatan Soeharto memberikan pandangan

dan buah pemikirannya tentang Pancasila secara menyeluruh, baik mengenai Pancasila sebagai keseluruhan serta masing-masing sila maupun pedoman penghayatannya. Meskipun secara konstitusional telah mendapatkan mandat untuk mengetrapkan dan mewujudkan Pancasila dalam kehidupan kenegaraan, namun Presiden Soeharto dalam menyajikan pandangannya itu tidak bersifat memaksa sebagaimana ditegaskannya:

“Sebagai manusia Pancasila saya *tidak memaksakan pandangan saya mengenai Pancasila ini* kepada Bangsa Indonesia. Yang saya inginkan adalah, agar pandangan-pandangan yang saya kemukakan itu, yang merupakan sumbangan fikiran itu mendapat perhatian masyarakat dan dunia ilmu pengetahuan kita, sebagai bahan pedoman penghayatan Pancasila yang perlu dikukuhkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah kita semua sepakat bulat.” (Kissantono, ed., 1984: 94).

Kecuali itu perlu diperhatikan pesan Presiden Soeharto yang sering disampaikan dalam berbagai kesempatan:

“Marilah kita ...sekali lagi dan untuk sekian kalinya mewas diri sejujur-jujurnya, apakah sikap dan perbuatan kita itu telah sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila”. Karena, “Pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan, Pancasila bukan bukan dasar falsafah Negara yang sekedar dikeramatkan dalam dokumen Pembukaan UUD; melainkan Pancasila harus diamalkan. Tanpa diamalkan, apapun dasar falsafah Negara yang kita pakai, apapun konsepsi yang kita buat, tidak akan berguna dan tidak ada artinya. Dan untuk mengamalkan dan menghayati Pancasila, Presiden Soeharto telah memberikan pedoman penghayatannya, yaitu “Eka Prasertia Panca Karsa”.

Mengapa Pancasila harus diresapi, diyakini, dihayati, diamalkan dan dipertahankan? Karena, “Pancasila bagi kita adalah masalah hidup matinya Bangsa Indonesia” (Krissantono, ed., 1984: 95).

Pernyataan Soeharto terakhir di atas, bahwa Pancasila bagi kita adalah masalah hidup matinya bangsa Indonesia ternyata menimpa dirinya sendiri karena Soeharto bertindak tidak sesuai dengan Pancasila sehingga ia harus *lengser* lantaran dipaksa untuk berhenti berkuasa. Menurut Arwan Tuti Artha (2007: 34), hal ini disebabkan karena kekuasaan yang dipegangnya memang sangat menakjubkan. Undang-undang pun bisa direkayasa,

untuk kepentingan kekuasaan dirinya. Keberanian melakukan apa yang sesuai dengan keinginannya tidak mungkin terjadi kalau kekuasaan tidak digenggamnya. Kekuasaan yang ada dalam genggaman Soeharto pada saat itu, menjadi mutlak, seakan-akan Soeharto adalah raja yang menerima wahyu dari Tuhan, sehingga semua harus melakukan petunjuk Soeharto. Jika tanpa petunjuk atau petunjuk Presiden Soeharto, semuanya akan keliru dan *ngawur*. Tak ada yang bisa menyamai kekuasaan presiden.

Lebih lanjut Arwan Tuti Artha (2007: 34-35) menjelaskan bahwa kalau saja mau, Indonesia bisa diubah menjadi sebuah kerajaan yang diperintah dari Istana Cendana. Maka Haji Mohammad Soeharto bisa kita bayangkan akan menjadi raja, bertakhta di atas singgasana dan memerintah secara mutlak. Ia didampingi Hajah Fatimah Siti Hartinah sebagai permaisuri. Sebagai raja, Soeharto hanya bisa digantikan orang lain, terutama dari keturunannya, setelah mangkat atau *lengser*. Soeharto mempunyai tiga anak laki-laki yang bisa diangkat menjadi putra mahkota untuk menggantikannya kelak, ketika *lengser*. Yakni Sigit Hardjojudanto, Bambang Trihatmodjo dan Hutomo Mandala Putera. Dari ketiga anak laki-lakinya itu, salah satunya bisa diangkat untuk menggantikannya menjadi raja.

Diyakini bahwa *lengser*nya Soeharto juga disebabkan oleh faktor budaya Jawa. Hiro Tugiman (1998: iv), menyatakan:

“Tidak berlebihan kami kemukakan bahwa *People Power* ala Yogya dengan sejuta manusia bisa berjalan tertib dan apik. Ini semua berkat karisma *Ngarso Dalem* (sebutan Sultan Yogya) yang sampai saat ini masih merupakan panutan dan keberpihakan keraton kepada rakyat secara konsisten. Ucapan *Ngarso Dalem* yang cukup terkenal (sindiran) yaitu, “Jika kita tidak dipercaya lagi, kita akan kehilangan kemanusiaan kita, dan itu berarti kehilangan segala-galanya, kendati berlimpah harta dan rangkap nyawanya”.

Tampaknya sindiran Sultan Yogya ini bergema juga di telinga Soeharto. Menurut Hiro Tugiman (1998: 119-120), ketika haru biru berlangsung, Presiden Soeharto sedang berada di Kairo, menghadiri pertemuan G-15. Di hadapan warga Indonesia di sana, Presiden bilang, “Bila masyarakat tak lagi memberi kepercayaan, dirinya akan *madeg pandhito* (menjadi agamawan). Pernyataan ini segera disambut amat ramai dan ditafsirkan bahwa “Presiden siap mundur” atau *lengser keprabon* (berhenti jadi pemimpin negara – frasa yang diluncurkan sendiri oleh Presiden Soeharto).

Hiro Tugiman (1998: 131-132) selanjutnya menuturkan:

“Rabu tanggal 20 Mei 1998, sebetulnya ada acara akbar di Jakarta: Peringatan Hari Reformasi Nasional bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, di Lapangan Monas. Acara ini dibatalkan Amien Rais untuk menghindari konflik dengan aparaturnya keamanan. Aksi Mahasiswa makin terpusat di kawasan Gedung DPR/MPR. Jumlah massa yang datang kian membludak dengan kehadiran beberapa sivitas akademika dari luar Jabotabek. Sekitar 47 mahasiswa yang mengatasnamakan perwakilan mahasiswa meminta kepastian kepada Harmoko kapan tuntutan agar Pak Harto mundur disampaikan. Ketua Umum GOLKAR itu menjawab, Pak Harto harus sudah mengundurkan diri paling lambat hari Jumat, tanggal 22 Mei 1998. Ternyata Kamis pagi tanggal 21 Mei 1998, Pak Harto menyatakan berhenti, dan Prof. Dr. B.J. Habibie langsung disumpah menjadi Presiden RI ketiga”.

Mundurnya Soeharto disambut histeris oleh massa mahasiswa yang menduduki Gedung MPR/DPR, namun kerja besar berikutnya sudah menunggu karena Tap MPR No. XI/MPR/1988 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN memerintahkan proses peradilan, termasuk Soeharto. Apakah Tap MPR ini sudah dilaksanakan? Menurut Yusril, “Tap MPR itu sudah dilaksanakan. Penyidikan sudah dilakukan. Bahkan, pengadilan telah membuka sidang. Namun pak Harto tidak dapat hadir karena kondisi kesehatannya” (Kompas, 11/5/06).

Melengkapi apa yang diutarakan oleh Yusril di atas, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menjelaskan bahwa agar perkara korupsi dana yayasan yang disangkakan kepada Soeharto tidak berlarut-larut Kejaksaan mengeluarkan SKPPP pada tanggal 11 Mei 2006. Dengan demikian status Soeharto adalah *bebas demi hukum*. Hal ini mengingat kondisi kesehatan Soeharto dalam enam tahun terakhir tidak makin membaik, malahan memburuk. Putusan MA agar Kejaksaan mengobati Soeharto sampai sembuh tidak dilaksanakan Kejaksaan (Kompas, 14/5/2006).

C. PERUMUSAN MASALAH

Kerlinger sebagaimana dikutip F. Sugeng Istanto (1999: 1) menyatakan bahwa permasalahan adalah suatu pernyataan yang menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih. Permasalahan dirumuskan lebih jelas dalam susunan kalimat tanya. Variabel I dalam penelitian ini adalah “ketentuan hukum tentang SKPPP” dan variabel II adalah “penyelesaian perkara tindak pidana korupsi mantan Presiden Soeharto”.

Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Bagaimana hubungan antara ketentuan hukum tentang SKPPP dengan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi mantan Presiden Soeharto?”

D. TUJUAN PENELITIAN

-
1. Mengetahui ketentuan-ketentuan hukum tentang SKPPP dalam hukum acara pidana positif Indonesia.
 2. Mengetahui proses penyelesaian perkara tindak pidana mantan Presiden Soeharto.

3. Mengetahui hubungan antara ketentuan hukum tentang SKPPP dengan proses penyelesaian perkara tindak pidana mantan Presiden Soeharto dan opini publik yang berkembang di dalam masyarakat.

F. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini bermanfaat karena dapat memberikan sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan negara yang dapat dilihat dari tiga aspek sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum acara pidana yang berkaitan dengan SKPPP.
2. Masalah SKPPP diatur dalam KUHAP, khususnya Pasal 140. Melalui penelitian ini diharapkan ditemukan hal-hal yang spesifik mengenai penerapan Pasal 140 KUHAP sehingga kasanah ilmu pengetahuan hukum acara pidana, khususnya tentang SKPPP lebih diperkaya lagi.
3. Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pembangunan hukum di Indonesia, khususnya dalam hal pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku, apakah telah dilaksanakan secara konsisten atau tidak. Konsistennya pelaksanaan hukum sangat dipengaruhi oleh kinerja aparat penegak hukum atau pelaksana hukum, dengan demikian melalui penelitian ini diharapkan diperoleh manfaat berupa potret pelaksanaan ketentuan hukum berkaitan dengan SKPPP yang sangat diperlukan untuk mengevaluasi pelaksanaan penegakan hukum yang berkaitan dengan mantan Presiden Soeharto oleh aparat penegak hukum terkait.

G. METODE PENELITIAN

1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah proses penyelesaian perkara tindak pidana mantan Presiden Soeharto yang telah dihentikan dengan instrumen SKPPP. Juga yang menjadi obyek penelitian ini adalah opini publik berupa pro kontra dalam kehidupan masyarakat berkaitan dengan penerapan instrumen SKPPP dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi mantan Presiden Soeharto.

2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada kaidah-kaidah ilmu hukum, dalam hal ini kaedah-kaedah hukum acara pidana positif yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan SKPPP.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Namun penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder, sedangkan data primer lebih bersifat penunjang.

b. Sumber data

Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Untuk data sekunder, sumber primer yang digunakan berpusat pada KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan adalah pendapat para ahli hukum, baik praktisi maupun teoritis mengenai permasalahan yang diteliti, serta hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya menyangkut proses

penyelesaian perkara tindak pidana korupsi mantan Presiden Soeharto. Di samping itu digunakan sumber sekunder berupa pendapat pro kontra di kalangan teoritis dan praktisi hukum yang berkembang dalam masyarakat berkaitan dengan penerapan SKPPP sebagai instrumen untuk menghentikan proses penyelesaian perkara tindak pidana mantan Presiden Soeharto sehingga memberinya status *bebas demi hukum*.

Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara mendalam (*depth interview*) dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan.

4. Populasi dan Penentuan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jaksa yang ada, baik di Kejari maupun Kejati Yogyakarta.

b. Penentuan Sampel

Untuk memperoleh data primer, penelitian ini tidak dilakukan terhadap populasi tetapi terhadap sampel yang ditentukan dengan teknik purposive sampling (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990: 51) karena mengandung ciri-ciri, sifat-sifat dan atau karakteristik yang merupakan ciri-ciri utama dari populasi dalam penelitian ini. Karena itu untuk penegak hukum hanya diambil Jaksa yang ditunjuk oleh baik oleh Ketua Kejari maupun oleh Ketua Kejati Yogyakarta yang ditunjuk pimpinan kedua lembaga tersebut.

Beberapa peneliti (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1983: 106) menyatakan bahwa untuk mendapatkan data yang representatif besarnya

sampel harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu tidak boleh kurang dari 10 (sepuluh) persen atau berkisar antara 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen dari seluruh populasi. Oleh karena itu sampel dalam penelitian ini ditentukan sebagai berikut:

- 1) 5 (lima) persen dari jaksa yang ada di Kejari Yogyakarta;
- 2) 5 (lima) persen dari jaksa yang ada di PN Yogyakarta:
 - Jaksa yang ditunjuk sebagai narasumber di Kejari Yogyakarta.
 - Jaksa yang ditunjuk sebagai narasumber di Kejati Yogyakarta.

5. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah Kejari Yogyakarta dan Kejati Yogyakarta.

6. Responden

Berdasarkan metode penentuan sampel sebagaimana diutarakan di atas, maka responden dalam penelitian ini adalah:

- Jaksa di Kejari Yogyakarta yang ditunjuk.
- Jaksa di Kejati Yogyakarta yang ditunjuk.

7. Cara Pengumpulan data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

- a. Untuk data primer, dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara *interview* menggunakan pedoman yang telah disediakan sebelumnya yang ditujukan kepada responden. Disamping itu dipergunakan pula kuesioner, yaitu daftar pertanyaan yang sifatnya tertutup dan terbuka, yang disiapkan sebelumnya untuk diajukan kepada responden.

- b. Untuk data sekunder, baik berupa bahan-bahan hukum primer maupun sekunder, dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mencari data dalam naskah-naskah resmi yang ada berkaitan dengan materi yang diteliti.

8. Cara Menganalisis data

Dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Menurut F. Sugeng Istanto (1999: 6), analisis kualitatif adalah analisis data yang didasarkan atas kualitas, nilai, atau keadaan data yang diperoleh. Dengan kata lain pencarian kebenaran dalam penelitian itu didasarkan atau diukur dengan kualitas, nilai atau keadaan data yang bersangkutan. Analisis kualitatif dalam penelitian harus mendapat kebenaran dengan mengukur data yang diperoleh dengan unsur-unsur ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini kebenaran akan ditentukan berdasarkan kualitas data.

Analisis kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan mengelompokkan data yang berupa, norma hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Analisis ini dilakukan dengan cara:

- a) Perbandingan data
- b) Ukuran berdasarkan prinsip hukum sebagaimana terdapat di dalam

KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Setelah data yang diperlukan terkumpul, diadakan pembahasan dengan menggunakan metode deduksi. Menurut F. Sugeng Istanto (2007: 36),

metode deduksi adalah suatu cara mengungkap suatu kebenaran dengan mengukur kesesuaian suatu spesies dengan genusnya. Di dalam pembahasan tentang penerapan hukum positif ini, yang merupakan genus adalah KUHAP yang berlaku umum, sedang spesiesnya adalah SKPPP, yang merupakan realisasi ketentuan hukum yang berlaku umum tersebut.



BAB II

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENUNTUTAN

A. PRAPENUNTUTAN

KUHAP tidak memberikan definisi mengenai prapenuntutan, karena itu pengertian prapenuntutan tidak ditemukan dalam Pasal 1 yang bersisi definisi-definisi. Istilah prapenuntutan ditemukan dalam Pasal 14 KUHAP butir b yang berbunyi:

“mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik”.

Dengan demikian yang dimaksud dengan prapenuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Menurut Andi Hamzah (2001: 154), inilah yang terasa janggal karena memberi petunjuk kepada *penyidik* untuk menyempurnakan *penyidikan* disebut prapenuntutan. Hal seperti ini dalam aturan lama (HIR), termasuk *penyidikan lanjutan*. Karena itu Andi Hamzah berpendapat bahwa pembuat undang-undang (DPR) hendak menghindari kesan seakan-akan jaksa atau penuntut umum itu mempunyai wewenang penyidikan lanjutan, sehingga hal itu disebut prapenuntutan. Petunjuk untuk menyempurnakan penyidikan pada hakekatnya merupakan bagian dari penyidikan lanjutan.

Sementara itu Bambang Purnomo (1982: 60) mengatakan bahwa dengan adanya tingkat prapenuntutan pada proses perkara pidana, dapatlah sekiranya diartikan perluasan tugas Jaksa dalam tingkat prapenuntutan dan penuntutan. Kemungkinan lain

dapat diartikan bahwa prapenuntutan itu adalah kata pengganti dari tugas penyidikan yang mengutamakan aspek-aspek hukum yang secara “de iure” ada pada Jaksa, dan tugas penyidikan yang secara “de facto” ada pada Polri. Pengertian prapenuntutan yang terakhir ini secara materiil mendekati kebenaran, apabila Pasal 14 (b) itu dihubungkan dengan Pasal 110 yang berbunyi:

(1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera

menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.

(2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata

masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

(3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum.

(4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Menurut Andi Hamzah (2001: 155), Pasal 110 KUHP perlu dibandingkan dengan Pasal 138 yang berbunyi:

(1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

(2) Dalam hal hasil penyelidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu

kepada penuntut umum.

Andi Hamzah selanjutnya menjelaskan bahwa kedua pasal tersebut seharusnya dapat disatukan kalau sistematik KUHAP berbentuk lain. Yang timbul dalam praktek ialah apabila penuntut umum setelah meneliti hasil pemeriksaan penyidik dipandang olehnya sudah cukup, tetapi penyidik tidak tepat mencantumkan pasal undang-undang pidana yang didakwakan, apakah penuntut umum berwenang mengubah pasal tersebut dengan pasal yang lebih sesuai. Hal itu dapat dilakukan oleh penuntut umum secara langsung, karena dialah yang bertanggung jawab atas kebijakan penuntut. Penuntut umum *dominus litis* dalam hal penuntutan. Ia bebas untuk menetapkan peraturan pidana mana yang akan didakwakan dan mana yang tidak.

B. PENUNTUTAN

Penuntutan didefinisikan di dalam Pasal 1 angka 7, sebagai berikut:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Berdasarkan definisi tersebut, maka R. Atang Ranoemihardja (1976: 94) menyatakan bahwa sebelum penuntut umum mengajukan permintaan (tuntutan) pada Ketua Pengadilan, maka tugas yang harus diselesaikan sebelum itu ialah:

-
1. mempelajari dan meneliti berkas perkara yang diajukan, Apakah telah cukup kuat dan terdapat bukti-bukti tertuduh telah melakukan tindak pidana. Untuk mendapatkan kepastian tentang hal tersebut, maka disamping mengadakan pemeriksaan atas diri terdakwa dan dimana dianggap perlu juga melakukan pemeriksaan atas diri para saksi, dan jaksa haru meneliti juga tentang barang-barang bukti.
-

2. Setelah diperoleh gambaran yang jelas dan pasti tentang adanya tindak pidana dari tertuduh, maka atas dasar itu Jaksa lalu membuat surat tuduhan. Dalam pembuatan surat tuduhan harus diuraikan rangkaian tindak pidana yang telah diperbuat oleh terdakwa dengan menyebutkan unsur-unsur pidana sebagai dituduhkan.

Di dalam Pasal 137 KUHP, ditentukan:

“ Penuntut umum bewenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”.

Mengenai daerah hukum atau wilayah hukum seorang Jaksa, E. Bonn – Sostrodanukusumo sebagaimana dikutip Andi Hamzah (2001: 158) menyatakan, seorang Jaksa mempunyai daerah hukum masing-masing sesuai dengan daerah hukum kejaksaan negeri dimana dia diangkat. Jadi seorang Jaksa di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung hanya dapat menuntut orang jika ia terlebih dahulu diangkat untuk kejaksaan negeri yang daerah hukumnya dilakukan delik itu. Dalam praktek seorang Jaksa yang ditempatkan di kejaksaan tinggi atau di kejaksaan agung yang akan menjadi penuntut umum di suatu pengadilan negeri, ia diangkat terlebih dahulu (didetasir) di kejaksaan negeri yang wilayah hukumnya sama dengan pengadilan negeri tersebut.

Pasal 139 KUHP menentukan:

“Setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan atau tidak untuk dapat dilimpahkan ke pengadilan”.

Pasal ini menegaskan bahwa kebijakan penuntutan ada pada Jaksa. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka penuntut umum akan melakukan berbagai pilihan sebagai berikut:

1. melakukan penuntutan berdasarkan ketentuan Pasal 14 (g) KUHP.
2. menghentikan penuntutan, karena tidak cukup bukti atau bukan merupakan perbuatan pidana, yang dituangkan dalam surat ketetapan, kecuali ada alasan baru untuk menuntut kembali terhadap tersangka yang bersangkutan, menurut peraturan Pasal 140 KUHP.
3. menutup perkara demi kepentingan hukum, menurut peraturan dalam Pasal 14 (h) jo Pasal 140 KUHP.
4. menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum, yang dilaksanakan khusus oleh Jaksa Agung, menurut peraturan Pasal 8 UU No. 15 Tahun 1961.

Bila dibandingkan dengan kebijakan penuntutan dalam sistem peradilan pidana di Belanda, Hulsman sebagaimana disadur oleh Soedjono Dirdjosisworo (1984: 48-50), mengutarakan bahwa, setelah menerima berita acara dan laporan polisi jaksa mempunyai beberapa opsi sebagai berikut:

-
1. Ia dapat membebaskan perkara tersebut dengan dalih tidak beralasan (kekuasaan untuk tidak menuntut/*non prosekusi*). Dapat dibedakan antara pembebasan karena alasan atidak berwenang (*bevoegdheissepot*) dan pembebasan (mengenyampingkan) berdasarkan kebijaksanaan (*beleidssepot*). Pembebasan dengan alasan “tidak berwenang” (*non kompetensi*) berlaku apabila kantor kejaksaan berpendapat bahwa wewenang formal sistem peradilan pidana belum terpenuhi, misalnya kurangnya bukti tentang kesalahan tertuduh (perbuatannya tidak dapat dibuktikan) atau terdapat kesangsian perihal dapat dihukum atau dapat dipertanggung jawabkannya penuntutan terhadap perbuatan tadi. Pembebasan berdasarkan kebijaksanaan

berlaku apabila kantor kejaksaan berpendapat wewenang formal sistem peradilan pidana telah terpenuhi namun bagaimanapun telah meyakinkan adanya penuntutan.

2. Ia dapat minta kepada polisi untuk melengkapi atau menambah informasi mengenai kasus tadi atau minta laporan sosial atau kejiwaan (sosial atau psikiatri) dari kepala probasi atau ahli psikiatri.
 3. Ia dapat membebaskan kasus tersebut setelah memanggil si pelaku dan menegurnya karena perilakunya (teguran kejaksaan).
 4. Ia dapat menetapkan untuk memberikan pembebasan bersyarat (*voorwaardelij-sepot*) dengan menggunakan syarat serupa itu sebagai penggantian rugi kepada kerugian sang korban menyerahkan si pelaku kepada aparat-aparat sosial atau medis (kedokteran), atau menempatkannya untuk masa percobaan/probasi.
 5. Apabila tindak pidananya ringan dan juga pada tindak pidana yang agak lebih serius ia dapat mengadakan transaksi dengan si pelaku berdasarkan mana, yang disebut belakangan, si pelaku, setuju untuk membayar uang (bisa dibandingkan dengan semacam denda) tanpa penghukuman.
 6. Ia dapat mengajukan perkara/kasus tadi kepada hakim instruksi (*rechter-commissaris*) untuk mengadakan penyelidikan lebih lanjut sebelum mengambil keputusan. Di Negara Anglo-Saxon, hakim tidak banyak menyelidiki: hanya melihat bagaimana sebenarnya, melalui jaksa dan dewan juri/saksi-saksi dan sebagainya.
-

7. Ia dapat mengajukan kasus tadi ke pengadilan dan jika demikian harus menetapkan tuduhan apa saja yang akan diajukan.

C. SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA (SKPPP)

Tindakan penuntutan adalah melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus di sidang pengadilan. Maka dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan berdasarkan Pasal 140 ayat (1).

Namun jika menurut pertimbangan penuntut umum suatu perkara tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke pengadilan atau perkara tersebut bukan merupakan suatu delik atau perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum membuat surat ketetapan mengenai hal itu berdasarkan Pasal 140 ayat (2) butir a.s.d. d yang berbunyi:

-
- a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
 - b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
 - c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasehat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.
 - d. Apabila kemudian ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.
-

Menurut Martiman Prodjohamidjojo (1989: 66), perbedaan antara perkara dihentikan demi hukum dan perkara ditutup demi hukum serta pengesampingan perkara adalah sebagai berikut:

1. Perkara dihentikan penuntutannya, dalam hal ini yang berwenang memutuskan ialah penuntut umum oleh karena tidak terdapat cukup bukti atau karena peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana (Pasal 140 ayat 2 huruf a). Terhadap perkara yang demikian tidak ditutup kemungkinan untuk mengadakan tuntutan lagi, bilamana diperoleh alasan baru oleh penuntut umum yang berasal dari keterangan terdakwa, saksi, benda atau petunjuk yang baru kemudian diketahuinya atau didapatnya (Pasal 140 ayat 2 huruf d).
2. Perkara ditutup demi hukum, dalam hal ini yang berwenang memutuskan ialah penuntut umum, karena tersangka meninggal dunia, karena perkaranya tergolong *ne bis in idem* atau daluwarsa. Keadaan perkara ditutup dikaitkan dengan Buku I KUHP Bab VIII tentang hapusnya hak menuntut yakni Pasal 76, 77, 78 (Pasal 140 ayat 2 huruf a).
3. Perkara dikesampingkan, dalam hal ini yang berwenang hanya Jaksa Agung, selaku penuntut umum tertinggi, dengan alasan untuk kepentingan umum (Pasal 77, penjelasan resmi). Kriteria demi kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas di Negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi. KUHP dalam penjelasan resmi Pasal 77, menyatakan bahwa dengan "penghentian penuntutan" tidak termasuk pengesampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung. Dapat disimpulkan bahwa KUHP mengakui eksistensi perwujudan oportunitas. Terhadap perkara yang dikesampingkan tetap dapat dituntut karena memenuhi persyaratan, akan tetapi demi kepentingan umum, Jaksa Agung tidak melakukan penuntutan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

MANTAN PRESIDEN SOEHARTO

Pada masa pemerintahan Habibie proses pemeriksaan atas diri Soeharto terkesan berjalan sangat lambat. Mantan Jaksa Agung, Andi Ghalib, ketika itu memang dapat memeriksa arsitek Orde Baru itu di Kejaksaan Agung. Bahkan ada tim khusus yang dibentuk untuk melacak kekayaan Soeharto yang katanya disimpan di Swiss, namun semuanya itu hanya tipu daya dan akal-akalan belaka untuk menyenangkan hati rakyat. Proses penanganan masalah KKN mantan Presiden Soeharto terkesan berjalan di tempat dan tidak mengalami kemajuan berarti.

Ketika Gus Dur menggantikan Habibie dan Marzuki Darusman menggantikan Ghalib, proses penanganan masalah KKN Soeharto mengalami sedikit kemajuan. Namun tampaknya sudah terlambat, karena dengan alasan sakit Soeharto tidak dapat dihadirkan Jaksa di PN Jaksel pada tanggal 21 Agustus 2000 dalam perkara No. 842/PidB/2000/PN Jaksel. Oleh karena itu pada tanggal 14 September 2000 Majelis Hakim PN Jaksel yang diketuai Lalu Mariun membentuk Tim Dokter independen dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk memeriksa kesehatan Soeharto dan akhirnya mengembalikan berkas perkara Soeharto ke Kejaksaan Agung dan mencoretnya dari register pengadilan.

Di bawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Kejaksaan Agung mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) atas penetapan Majelis Hakim tersebut dan pada tanggal 8 November 2000 PT DKI Jakarta menerima banding dan membatalkan putusan PN Jaksel dan memerintahkan membuka sidang kembali. Namun Tim Penasihat hukum Soeharto mengajukan kasasi Ke MA dan pada tanggal 2 Februari 2001 putusan banding tersebut dianulir oleh MA yang dalam putusan kasasinya memerintahkan Kejaksaan mengobati Soeharto sampai sembuh. Merujuk pada keterangan dokter yang menyatakan bahwa Soeharto sakit dan tidak dapat disembuhkan, MA juga berpendapat serupa, namun kewenangan untuk membuka kembali perkara tersebut di pengadilan ada pada Kejaksaan Agung. Jaksa Agung saat itu Baharuddin Lopa berusaha mengumpulkan data tentang KKN Soeharto, tetapi sebelum tugasnya selesai ia meninggal karena serangan jantung ketika berkunjung ke Arab Saudi. Setelah itu masalah Soeharto jarang kedengaran lagi karena pemerintah memusatkan perhatian pada kasus teror bom yang marak di Indonesia setelah peristiwa WTC 11 September 2001.

Antiklimaks penyelesaian perkara tindak pidana korupsi mantan presiden Soeharto justru terjadi pada masa kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Yusuf Kalla (YK) yang pada masa kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden mengobral janji untuk memberantas korupsi di Indonesia sampai ke akar-akarnya. Tanggal 10 Mei 2006 Presiden SBY didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Widodo AS, Menteri Sekretaris negara Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh melakukan rapat konsultasi dengan

Wakil Presiden YK, Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Ketua DPR Agung Laksono, dan Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita.

Widodo AS yang memberikan keterangan pers sesuai rapat menyatakan: “Di dalam rapat konsultasi tersebut disepakati bahwa penyelesaian status Pak Harto didasarkan pada pertimbangan politik, ekonomi, hukum, kemanusiaan, kesehatan, moral, preseden sejarah, dan sikap terhadap mantan presiden sebelumnya. Untuk menyusun konstruksi penyelesaian dengan pertimbangan itu, diperlukan kelengkapan dokumen dan Presiden menugaskan beberapa menteri untuk melengkapi. Dalam waktu sesegera mungkin keputusan akan dikeluarkan Presiden Yodhoyono” (Kompas, 11/5/2006).

Sementara itu Mensesneg Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa pemerintah mengambil sikap untuk menghentikan proses peradilan Soeharto. Yusril memastikan proses peradilan terhadap Soeharto sudah dihentikan lewat surat ketetapan penghentian penuntutan perkara (SKPPP) yang dibuat Kejaksaan Negeri Jaksel 11 Mei 2006. Presiden sudah menerima SKPPP tersebut serta pencabutan pencekalan Soeharto dari Jaksa Agung. Yusril selanjutnya menjelaskan bahwa SKPPP itu didasarkan pada Pasal 140 KUHP, jadi bukan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan), tetapi SKP3 (surat ketetapan penghentian penuntutan perkara) (Kompas, 11/5/2006).

Namun yang membingungkan masyarakat ialah, ketika kejaksaan telah mengeluarkan SKPPP agar perkara korupsi dana yayasan yang disangkakan kepada Soeharto tidak berlarut-larut, berarti status Soeharto *bebas demi hukum*, Presiden SBY menyatakan menunda keputusan mengenai status hukum mantan Presiden

Soeharto. Dia menilai keputusan tentang status hukum Soeharto tidak perlu dilakukan secara *grusa-grusu* (terburu-buru). Dia menegaskan bahwa penundaan dilakukan agar keputusan yang sebenarnya bertujuan mulia justru tidak menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat, karena sejak munculnya wacana untuk menyelesaikan bagaimana status yang terbaik bagi mantan Presiden Soeharto dan pemerintah menyikapinya, timbul pro kontra di dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu sebagai Kepala negara dia menegaskan: “Saya menelaah kembali dari hati dan pikiran yang jernih. Meskipun tujuannya baik dan konstruktif – untuk kearifan bangsa, namun karena adanya benih-benih perpecahan itu, saya memilih untuk mengendapkan masalah ini sampai situasinya betul-betul tepat” (Kompas, 14/5/2006).

Pernyataan Presiden SBY yang memilih mengendapkan kasus mantan Presiden Soeharto memicu polemik baru karena ketidakjelasan sikap pemerintah terhadap kasus Soeharto. Menurut Amien Rais, tidak jelasnya penanganan kasus Soeharto menyebabkan *karut-marut* kontroversi di dalam masyarakat. *Karut-marut* tersebut misalnya, terlihat dari pernyataan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh yang mengatakan, menutup kasus soeharto lewat SKPPP, sedangkan Presiden Yudhoyono memutuskan mengendapkan kasus Soeharto. Amien meminta Presiden SBY menunjukkan kepemimpinannya dalam menyelesaikan kasus itu, dan tidak boleh dilempar ke Kejaksaan dan Tim Taspitikor (Kompas, 15/5/06).

**B. REAKSI MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN INSTRUMEN SKPPP
DALAM PENYELESAIAN PERKARA KORUPSI MANTAN PRESIDEN
SOEHARTO**

Masyarakat pada umumnya menyesalkan terbitnya SKPPP atas Soeharto. Pengacara Adnan Buyung Nasution (Kompas, 15/5/06), mengatakan bahwa kasus Soeharto mestinya diserahkan kepada mekanisme hukum, bukan mekanisme politik. Sesuai prinsip demokrasi konstitusional, kita harus menempatkan hukum sebagai panglima. Beliau menghimbau elite politik tak terpaku pada pertimbangan kemanusiaan serta melihat jasa Soeharto. Perlu dipertimbangkan pula fakta bahwa banyak anak bangsa yang teraniaya, yang ayah ibunya dipenjara tanpa pengadilan yang *fair*. Mereka itu masih menuntut keadilan.

Ahli hukum Albert Hasibuan (Kompas, 15/5/06), juga menyayangkan campur aduk Penanganan kasus Soeharto antara hukum dan politik. Terbitnya SKPPP jelas melanggar Tap MPR Nomor XI/MPR/1998.

Sementara itu Ketua Dewan Eksekutif Transparansi International Indonesia (TII) Todung Mulya Lubis (Kompas, 15/5/06) menyatakan bahwa keluarnya SKPPP kasus Soeharto merupakan contoh buruk bagi penegakan hukum. Argumen sakit tak bisa

dijadikan alasan pemaaf untuk menghentikan kasus itu. Ini adalah tonggak impunitas yang diberikan pemerintah kepada pelaku korupsi.

Rezky Wibowo dari TII (Kompas, 15/5/06), mengingatkan bahwa nilai kejahatan ekonomi Soeharto sangat besar. Berdasarkan survei Transparency International pada tahun 2004, Soeharto adalah presiden yang mengorupsi uang negara terbesar, terbesar, senilai 15 miliar - 35 miliar dollar AS, selama 1967 – 1998. Uang yang dikorupsi Soeharto jauh di atas Ferdinan Marcos (5 miliar – 10 miliar dollar AS), Mobutu Sese Seko (5 miliar dolar AS), atau Slobodan Milosevic (1 miliar dolar AS).

Selain itu, Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Agung Hendarto (Kompas, 15/5/06) mengatakan, pemerintah tak bisa menempatkan kasus Soeharto hanya sebagai masalah pemerintah, tetapi juga masalah bangsa, sehingga prinsip yang harus dilalui adalah *forgive but not to forget*. Menurut Agung, kasus Soeharto bukan sekadar masalah hukum, tetapi masalah penyelewengan moral politik.

Sementara itu Wakil Direktur YLBHI Robertus Robert menyayangkan keputusan Jaksa Agung menghentikan kasus Soeharto. Menurut Robertus Robert (Kompas,

15/5/06), Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh telah membuat prinsip negara hukum berantakan. Sebagai mantan aktivis YLBHI, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh justru membangkrutkan moralitas transisi politik.

Tamrin Amal Tomagola dalam artikelnya “Berperikemanusiaan, Tetapi Tidak Adil” (Kompas, 15/5/06), antara lain menyatakan penghentian proses peradilan Soeharto oleh pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu, seperti yang diumumkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menko Polhukam, jelas berdasarkan perikemanusiaan yang beradab tetapi tidak adil.

Dikatakan demikian karena tindakan penghentian bukan hanya menghentikan proses peradilan Soeharto, tetapi juga contoh paling mencolok dari penghentian penegakan sila perikemanusiaan yang adil dan beradab. Tindakan ini tidak hanya melanggar sila kedua Pancasila, kerangka dasar ideologi konstitusional Republik ini, tetapi juga dapat dimaknai sebagai upaya (1) *obstruction of justice*, yaitu penghalangan penegakan keadilan; (2) mengekalkan *impunity* atau ketakterjamahan hukum; dan (3) pengingkaran janji pemilu pasangan SBY-JK yang saat itu merayu calon pemilih dengan slogan: Aman, Sejahtera, dan Adil. Ternyata janji pemilu itu semakin jauh panggang dari apinya.

Lebih lanjut Tamrin Amal Tomagola menyatakan bahwa para kader didikan Soeharto, sipil dan militer, yang kini menguasai berbagai lembaga kenegaraan, *old players, new games*, yang beberapa waktu lalu di Istana sepakat menghentikan proses peradilan Soeharto, lalai menerapkan sila kedua secara utuh. Pelanggaran Pancasila berupa penyuntatan dalam penerapan, cukup menjadi alasan konstitusional yang sah untuk pengguliran proses *impeachment*, pemecatan Presiden dan Wakil Presiden.

Ternyata reaksi terhadap terbitnya SKPPP Soeharto tidak hanya memunculkan reaksi perorangan seperti diuraikan di atas, tetapi juga mengundang aksi unjuk rasa di sejumlah kota, karena selain dianggap melukai rasa keadilan masyarakat dan semangat reformasi, tindakan itu dianggap melampaui kewenangan Jaksa Agung. Dalam aksi unjuk rasa di Jakarta (Kompas, 16/5/06), anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat, Nursyahbani Kaljasungkana menyindir, “SKPPP itu hadiah terindah Kejaksaan terhadap korban Mei. Kita juga kehilangan kesempatan emas untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita negara hukum dan bertekad memberantas korupsi”. Nursyahbani Kaljasungkana menilai bahwa, Pasal 140 KUHP yang dijadikan dasar hukum oleh Jaksa Agung tidak tepat karena aturan itu hanya mengatur

penghentian penuntutan perkara kalau tidak cukup bukti, peristiwa itu bukan tindak pidana, atau perkara itu ditutup demi hukum. Menurut Nursyahbani, penghentian kasus Soeharto lebih disebabkan sakit. Karena itu, yang lebih tepat dijadikan dasar hukum adalah Pasal 44 ayat (3) KUHP. Tetapi ketentuan ini merupakan wewenang Mahkamah Agung dan pengadilan.

Aksi unjuk rasa di Bandung, anggota Dewan Pembina Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Dindin S. Maolani (Kompas, 16/5/06), mengingatkan, peradilan terhadap mantan Presiden Soeharto harus tetap dilanjutkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat serta penegakan hukum di negara ini, dan di mata dunia internasional. Ditegaskan oleh Dindin bahwa persidangan *in absentia* masih sangat relevan dengan kondisi Soeharto.

Reaksi juga datang dari berbagai kota seperti Solo, Makassar, Semarang, Aceh dan Purwokerto. Dari Solo, Mudridk Setiawan M. Sangidue, yang mengatasnamakan Keluarga Besar Mega Bintang, menyatakan (Kompas, 16/5/06), pemerintah harus adil menangani kasus Soeharto. Jangan seenaknya sendiri main dibebaskan.

Di Makassar (Kompas, 16/5/06), demonstrasi penolakan terhadap SKPPP dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa untuk Demokrasi Eksekutif

Eksekutif Komisariat Indonesia Timur serta Jaringan Rakyat Miskin Kota. Di Semarang (Kompas, 16/5/06), unjuk rasa dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro. Mereka menentang dihentikannya perkara hukum dan pemerintah dinilai tidak mempunyai nyali untuk membongkar kasus korupsi besar.

Di Aceh (Kompas, 20/5/06), puluhan mahasiswa dari Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat menggelar unjuk rasa dengan berjalan dari Masjid Raya Baiturrahman hingga Simpang Lima. Mereka menilai penghentian pengadilan Soeharto adalah pengkhianatan Reformasi. "Penghentian pengadilan terhadap Soeharto adalah bukti nyata adanya pengkhianatan terhadap reformasi," kata Rahmat Djailani, Sekjen Solidaritas mahasiswa untuk Rakyat. Tuntutan untuk melanjutkan proses pengadilan Soeharto juga bergulir di Purwokerto (Kompas, 20/5/06). Pukuan mahasiswa yang tergabung dalam KAMMI Daerah Purwokerto melakukan *longmarch* dan menuntut agar SKPPP Soeharto dicabut.

Ternyata reaksi terhadap langkah Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menerbitkan SKPPP tidak hanya berasal dari tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemahasiswaan, tetapi juga dari KPK. Ketua KPK Taufiequrahman Ruki

(Kompas, 17/5/06), mengatakan bahwa KPK meminta Presiden agar tidak menyelesaikan kasus mantan Presiden Soeharto secara politik, tetapi tetap menempuh jalur hukum. Penyelesaian melalui jalur hukum ini sesuai dengan isi Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

Menurut Taufik, yang datang bersama Wakil Ketua Erry Riyana Harjapamekas, permintaan KPK disetujui Presiden Yudhoyono. "Beliau sependapat dengan apa yang disampaikan KPK dan menyatakan, karena ini sudah menyangkut masalah hukum, maka penyelesaiannya dilakukan dengan jalur hukum".

Pernyataan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono di depan KPK dikecam oleh Syamsuddin Harris. Di dalam artikelnya berjudul "Soeharto dan Balada Yudhoyono" (Kompas, 26/5/06), Syamsuddin Harris antara lain menyatakan: "Setelah Jaksa Agung menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara atau SKP3 atas nama mantan Presiden Soeharto, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan pernyataan kontroversil 'serahkan semua pada hukum'. Hukum yang mana?"

Menurut Syamsuddin Harris, dalam kasus Soeharto, Presiden Yudhoyono semestinya mendorong, bahkan kalau perlu menekan dan memaksa, Jaksa Agung untuk memastikan Soeharto sudah sehat lagi atau memang betul-betul sakit sehingga

tak layak untuk disidangkan mengingat adanya keputusan MA yang memerintahkan proses pengadilan dilanjutkan apabila mantan penguasa Orde Baru itu telah sehat. Jadi hukum yang harus diberlakukan adalah hukum yang secara konkrit diterapkan (*ius operatum*) dalam perkara Soeharto, yaitu keputusan MA tersebut. Namun ironisnya, Yudhoyono membiarkan Jaksa Agung menghentikan penuntutan atas Soeharto.

Lebih lanjut Syamsuddin Harris menyatakan bahwa, lebih ironis lagi Presiden Yudhoyono masih mempertahankan posisi Abdul Rahman Saleh sebagai Jaksa Agung padahal jelas-jelas bertentangan dengan kebijakan Presiden yang semula “mengembangkan” kasus Soeharto. Keputusan Presiden Yudhoyono “mengendapkan” kasus Soeharto sebenarnya dinilai cukup bijak. Artinya banyak prioritas persoalan bangsa yang amat mendesak untuk diselesaikan dalam jangka pendek, selain kasus Soeharto. Namun semua menjadi mentah kembali saat Jaksa Agung menerbitkan SKP3 atas Soeharto pada hari yang sama. Pemerintahan Yudhoyono pun dianggap mendua. Wajar jika kemudian muncul reaksi besar dari berbagai elemen prodemokrasi atas ambivalensi pemerintah.

C. PENERAPAN KETENTUAN HUKUM TENTANG SKPPP DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MANTAN PRESIDEN SOEHARTO

Proses hukum perkara tindak pidana korupsi mantan Presiden Soeharto telah dihentikan dengan dikeluarkannya SKPPP oleh Kejaksaan berdasarkan Pasal 140 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

- a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
- b. Isi surat tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
- c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasehat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.
- d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Dari ketentuan Pasal 140 ayat (2) butir a di atas jelas bahwa penuntutan perkara dapat dihentikan karena tiga alasan, yaitu tidak cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum. Jelas sekali ketentuan tersebut tidak menyebut alasan kesehatan. Oleh karena itu Romli Atmasasmita (Kompas, 9/1/2008) menyatakan, "sungguh aneh masalah hukum yang terkait mantan presiden ini karena dari sisi hukum, tuntutan pidana telah dihentikan dengan SKPPP oleh Jaksa Agung Abdulrahman Saleh dengan alasan sakit *permanent*".

Romli Atmasasmita selanjutnya menjelaskan bahwa tampaknya hal itu hanya merupakan *diskresi* Jaksa Agung. Sebenarnya lebih elegan dikeluarkan ketetapan

“penundaan proses penyidikan sampai yang bersangkutan sembuh” karena hal ini lebih aspiratif terhadap perasaan keadilan masyarakat sekaligus menjunjung tinggi Tap MPR I Tahun 2003 yang memperkuat Tap MPR XI Tahun 1998. Bertolak dari langkah hukum itu, tampaknya kasus ini sulit dilaksanakan sungguh-sungguh karena sarat dengan berbagai kepentingan masalah kemanusiaan masa lampau, selain masalah kemanusiaan semata-mata.

Menanggapi apa yang dikemukakan oleh Romli di atas, Abdul Rahman Saleh (Kompas, 12/1/2008) menyatakan bahwa:

“Sekitar awal Mei 2006, kesehatan mantan Presiden Soeharto memburuk dan segera merebak kembali kontroversi kasus hukumnya yang telah berlarut-larut sejak tahun 2000. Atas dasar kebutuhan untuk segera memberikan keadilan dan kepastian hukum, tanggal 12 Mei 2006 saya selaku Jaksa Agung memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk mengeluarkan surat penghentian penuntutan perkara (SKP3) atas perkara Soeharto. Dalam mencari solusi hukum yang tepat, Kejaksaan dihadapkan pada tiga kewenangan, yaitu menerbitkan SP3, *deponeering* sebagai hak oportunitas Jaksa Agung, dan menerbitkan SKP3. Yang dipilih adalah menerbitkan SKP3, dan itu sudah final”.

Jelas ada perbedaan pendapat antara Romli Atmasasmita dan Abdul Rahman Saleh mengenai penerapan instrument SKPPP dalam penyelesaian proses hukum mantan Presiden Soeharto. Menurut Romli Atmasasmita sebenarnya lebih elegan apabila dikeluarkan ketetapan “penundaan proses penyidikan sampai yang bersangkutan bersangkutan sembuh” karena hal ini lebih aspiratif terhadap perasaan keadilan masyarakat sekaligus menjunjung tinggi Tap MPR I Tahun 2003 yang memperkuat Tap MPR XI Tahun 1988.

Sedangkan menurut Abdul Rahman Saleh, Kejaksaan dihadapkan pada tiga kewenangan, yaitu menerbitkan SP3, *deponering* sebagai hak oportunitas Jaksa Agung, dan menerbitkan SKP3. Yang dipilih adalah menerbitkan SKP3, dan itu sudah final. Oleh karena itu, Tim Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber di Kejati DIY, yaitu Bapak Yusrin Nico, SH., Asisten Pidana Khusus Kejati DIY, Koordinator Pidana Khusus wilayah hukum Kejati DIY, pada tanggal 21 Maret 2008, dan Bapak Robert Hutagalung S.H., Jaksa di Kejari Yogyakarta, tanggal 22 Maret 2008 untuk memperoleh masukan mengenai penerapan instrument SKPPP dalam penyelesaian kasus korupsi mantan Presiden Soeharto.

Menurut, Bapak Yusrin Nico, SH., penerapan instrument SKPPP dalam penyelesaian kasus korupsi mantan Presiden Soeharto merupakan kebijakan pimpinan, dalam hal ini Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh. Pendapat serupa didukung oleh Bapak Robert Hutagalung, S.H. Pendapat kedua narasumber sebenarnya sama dengan pendapat Romli Atmasasmita yang telah dikutip di atas, yaitu bahwa hal itu merupakan *diskresi* Jaksa Agung. Dikatakan demikian, karena di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990: 208), *diskresi* berarti “kebebasan”

mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi”.

Terlepas dari dua pendapat yang ditemukan dalam penelitian ini tentang cara penyelesaian kasus korupsi mantan Presiden Soeharto, yaitu lebih elegan jika dikeluarkan ketetapan “penundaan proses penyidikan sampai yang bersangkutan sembuh” sebagaimana dikemukakan oleh Romli Atrnasasmita, dan “menerbitkan SKP3, dan itu sudah final” sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Rahman Saleh, Tim peneliti berpendapat lain.

Dalam hal ini Tim Peneliti tidak setuju dengan pendapat Abdul Rahman Saleh, karena penerbitan SKP3 dalam penyelesaian kasus korupsi mantan Presiden Soeharto hanya didasarkan pada *diskresi*, pada kebijakan berarti berdasarkan pada rasio semata-mata, bukan berdasarkan pada peraturan yang ada. Secara yuridis, SKP3 hanya boleh diterbitkan karena tiga alasan, yaitu tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau perkara itu ditutup demi hukum. Sedangkan alasan sakit permanen tidak termasuk dalam konteks Pasal 140 ayat (2) butir a KUHP. Karena itu menurut Tim peneliti SKP3 itu cacat hukum.

Di pihak lain, Tim Peneliti juga tidak sepenuhnya setuju dengan pendapat Romli

Atmasasmita. Tim Peneliti hanya setuju sebatas penggunaan istilah “penundaan”, namun bukan “penundaan proses penyidikan sampai yang bersangkutan sembuh”, tetapi “penundaan proses penuntutan sampai yang bersangkutan sembuh”. Tim peneliti berpendapat demikian, karena *de facto* proses penyelesaian kasus korupsi mantan presiden Soeharto sudah melewati tahap penyidikan dan bahkan sudah diperiksa oleh Majelis Hakim PN Jaksel, PT DKI, dan MA., yang akhirnya memutuskan untuk mengembalikan berkas perkara Soeharto ke Kejaksaan Agung dan memerintahkan Kejaksaan Agung mengobati Soeharto sampai sembuh, dan setelah itu Kejaksaan Agung berwenang untuk membuka kembali perkara tersebut di pengadilan. Menurut Tim Peneliti, membuka kembali perkara tersebut di pengadilan berarti melakukan penuntutan kembali.

Namun yang terjadi yaitu Kejaksaan Agung tidak mengobati Soeharto, bahkan sebaliknya mengeluarkan SKP3. Yang seharusnya dilakukan adalah menunda penuntutan kembali perkara tersebut sambil mengobati Soeharto hingga sembuh sesuai keputusan MA. Kejaksaan Agung dapat saja meminta pihak keluarga Soeharto untuk menanggung biaya pengobatan, karena MA hanya meminta Kejaksaan Agung mengobati Soeharto sampai sembuh, tanpa menyebut dari mana sumber biaya tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa secara yuridis, penerapan instrumen SKP3 dalam penyelesaian kasus Soeharto cacat hukum, karena SKP3 hanya boleh diterbitkan karena 3 alasan, yaitu: tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana, atau perkara itu ditutup demi hukum. Sedangkan alasan penerbitan SKP3 dalam kasus Soeharto adalah sakit permanent. Maka penerbitan SKP3 untuk menghentikan kasus Soeharto tidak masuk dalam konteks atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) KUHP.

Yang seharusnya dilakukan oleh Jaksa Agung adalah menunda penuntutan kembali kasus Soeharto sambil mengobati Soeharto hingga sembuh sesuai keputusan MA. Kejaksaan Agung dapat saja meminta pihak keluarga Soeharto untuk menanggung biaya pengobatan, karena MA hanya meminta Kejaksaan Agung mengobati Soeharto sampai sembuh tanpa menyebut dari mana sumber dana tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Tim Peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penanganan kasus korupsi yang besar dampaknya terhadap masyarakat luas seperti kasus mantan Presiden Soeharto ini hendaknya dilakukan secara lugas sesuai hukum yang berlaku tanpa mencampuradukkannya dengan politik, apalagi penuntasan kasus korupsi mantan Presiden Soeharto ini sebenarnya sudah diamanatkan oleh Tap MPR Nomor XI/MPR/1998.
 2. Diperlukan keberanian pemerintah dan penegak hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang besar dampaknya terhadap masyarakat untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
 3. Alasan sakit yang sering menghambat jalannya peradilan korupsi, sebaiknya dicarikan solusi berupa terobosan dengan menggelar pengadilan *in absentia* bagi terdakwa korupsi mangkir ke pengadilan dengan dalih sakit. Hal ini perlu dilakukan karena korupsi memang merupakan *extraordinary crime*, maka diperlukan cara-cara *extraordinary* untuk menanganinya.
-

DAFTAR PUSTAKA

- Artha, Arwan Tuti. 2007. *Dunia Spiritual Soeharto; Menelusuri Laku Ritual, Tempat-Tempat dan Guru Spiritualnya*, Cetakan IV, Yogyakarta: Gelanggangpress.
- Atmasasmita, Romli. 2006. "Kasus Mantan Presiden Soeharto". Kompas, 9/1/2006.
- Atmowiloto, Arswendo. 1986. *Pengkhianatan G30S/PKI*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hamzah, Andi. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harris, Syamsuddin. 2006. "Soeharto dan Belada Yudhoyono", Kompas, 26/5/06.
- Hulsman, Hc. 1984. *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Disadur oleh Soedjono Dirdjosisworo, Jakarta: CV. Rajawali.
- Istanto, Sugeng. 1999. "Teknik dan Metode Penelitian Hukum", Makalah disampaikan pada *Pelatihan Penelitian Intensif Terfokus*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UAJY, 10 Juli.
- _____. 2007. *Penelitian Hukum*, Cet. Ke 1, Yogyakarta: CV G A N D A.
- Krissantono, ed. 1984. *Pandangan Presiden Soeharto Tentang Pancasila*, Cetakan VII, Jakarta: Centre For Strategic And International Studies (CSIS).
- Poernomo, Bambang. 1982. *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1988. *Pembahasan Hukum Acara Pidana*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Ranoemihardja, Atang. 1976. *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Penerbit "Tarsito".
- Saleh, Abdul Rahman. 2006. "Duduk Perkara Kasus Soeharto", Kompas, 12/1/2006.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Tomagola, Tamrin Amal, 2006. "Berperikemanusiaan, tetapi Tidak Adil", Kompas, 15/5/2006.

Tugiman, Hiro. 1998. *Budaya Jawa & Mundurnya Presiden Soeharto*, Bandung: Tanpa Penerbit.

Kompas, 11/5/06. "Peradilan Soeharto Dihentikan; Pemerintah Kumpulkan Dokumen untuk Konstruksikan Penyelesaiannya".

Kompas, 11/5/06. "Soeharto Berterima Kasih, Yusril: Kejaksaan Terbitkan Surat Keketapan Penghentian Penuntutan Perkara".

Kompas, 14/5/2006. "Yudhoyono Tunda Putuskan Status Hukum Soeharto; SKPPP Dikeluarkan, Status Soeharto Bebas Demi Hukum".

Kompas, 15/5/06. "Presiden Mestinya Tegas Soal Soeharto".

Kompas, 16/5/06. "SKPPP Soeharto Bukan Kewenangan Jaksa Agung".



LAMPIRAN

Kuesioner untuk persiapan wawancara dengan Jaksa

A. Kuesioner untuk persiapan wawancara dengan Jaksa di Kejati DIY

1. Identitas diri Bapak/Ibu
 - a. Nama:
 - b. Agama:
 - c. Sudah berapa lama bertugas di Kejati Yogyakarta:
2. Pengalaman Bapak/Ibu dalam melakukan dakwaan dan penuntutan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi:
 - a. Pernah/Belum pernah:
 - b. Kalau pernah, berapa kali dan kapan (tahun):
 - c. Nama terdakwa:
3. Apakah Bapak/Ibu pernah menerapkan instrumen SKPPP dalam proses penuntutan perkara tindak pidana korupsi?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Kalau Ya,
 - a. Berapa kali?
 - b. Siapa terdakwa?
5. Apa perbedaan antara SKPPP dan SP3 ?
6. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi mantan Presiden Soeharto, menurut Bapak/Ibu, apakah SKPPP atau SP3 yang seharusnya diterapkan?
 - a. SKPPP
 - b. SP3
7. Kalau Bapak/Ibu lebih cenderung menerapkan SKPPP, apa alasannya?
8. Kalau Bapak/Ibu lebih cenderung menerapkan SP3, apa alasannya?

Terima Kasih

Catatan: Wawancara dilakukan tunggal...

B. Kuesioner untuk persiapan wawancara dengan Jaksa di Kejari

1. Identitas diri Bapak/Ibu

a. Nama:

b. Agama:

c. Sudah berapa lama bertugas di Kejari Yogyakarta:

2. Pengalaman Bapak/Ibu dalam melakukan dakwaan dan penuntutan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi:

a. Pernah/Belum pernah:

b. Kalau pernah, berapa kali dan kapan (tahun):

c. Nama terdakwa:

3. Apakah Bapak/Ibu pernah menerapkan instrumen SKPPP dalam proses penuntutan perkara tindak pidana korupsi?

a. Ya

b. Tidak

4. Kalau Ya,

a. Berapa kali?

b. Siapa terdakwa?

5. Apa perbedaan antara SKPPP dan SP3 ?

6. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi mantan Presiden Soeharto, menurut Bapak/Ibu, apakah SKPPP atau SP3 yang seharusnya diterapkan?

a. SKPPP

b. SP3

7. Kalau Bapak/Ibu lebih cenderung menerapkan SKPPP, apa alasannya?

8. Kalau Bapak/Ibu lebih cenderung menerapkan SP3, apa alasannya?

Terima Kasih

Catatan: Wawancara dilakukan tanggal ...